

## **Strategi Survival Masyarakat Pesisir dan Pedalaman Sumenep di Tengah Krisis Ekologi dan Industrialisasi**

**Shohebul Umam**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[Shohebul.umamjr@gmail.com](mailto:Shohebul.umamjr@gmail.com)

### **Abstract:**

*This study discusses poverty, which until now is still a major problem for the Indonesian state. The effort to eradicate poverty becomes a big commitment through the projected Sustainable Development Goal's (SDG's) which are determined to reduce the number of poor people to 50% in the next 2030. Instead of alleviating poverty, SDG's which insinuate welfare are more and more pressed by poverty itself. Global warming which drives climate change is uncertain, causes an ecological crisis on one side, and creates a consumptive culture of society on the other side. This research uses a qualitative method, in which coastal communities and inland farmers become in Sumenep, Madura is the object of this study. due to climate change that is getting worse, fishermen and farmers, must rearrange their survival strategies to meet the needs of family income. The government, in this case, must be encouraged to be a catalyst for change, in order to realize the social welfare of the community through the development of community-based communities that are independent and sustainable.*

*Penelitian ini membahas tentang kemiskinan, yang sampai saat ini masih menjadi persoalan utama negara Indonesia. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan menjadi komitmen besar melalui proyeksi Sustainable Development Goal's (SDG's) yang bertekad untuk menekan jumlah penduduk miskin hingga 50% pada 2030 mendatang. Alih-alih mengentaskan kemiskinan, SDG's yang meng-insinuasikan kesejahteraan justru samakan terdesak oleh kemiskinan itu sendiri. Global warming yang mendorong perubahan iklim tidak menentu, menyebabkan krisis ekologi pada satu sisi, dan menciptakan budaya konsumtif masyarakat pada sisi yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana masyarakat pesisir dan petani pedalaman menjadi di Sumenep, Madura menjadi objek kajian ini. akibat perubahan iklim yang semakin buruk, nelayan dan petani, harus mengatur kembali strategi survival mereka untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Pemerintah dalam hal ini, mesti didorong untuk menjadi katalisator perubahan, demi mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pengembangan masyarakat berbasis komunitas yang bersifat mandiri dan berkelanjutan.*

**Kata kunci:** *industrialisasi; kemiskinan; krisis ekologi; strategi survival; sustainable.*

## **Pendahuluan**

Kemiskinan, hingga sampai hari ini, tidak dapat dipungkiri masih menjadi beban dunia secara global. Kenyataan ini tentu sangat bertentangan dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan yang diproyeksikan melalui SDG's (*Sustainable Development Goals*) yang diikuti oleh 193 Negara pada September 2015 dan berhasil mendeklarasikan beberapa target penting, salah satunya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50% (Ishatono and Raharjo 2016, 159). Tekat ini mengindikasikan bahwa, kemiskinan merupakan beban dunia, bahkan hingga abad ke-21. Upaya besar untuk mengentaskan kemiskinan secara global melalui SDG's patut mendapat apresiasi tinggi. Meskipun pada kenyataannya angka kemiskinan tidak menunjukkan penurunan signifikan, bahkan di beberapa daerah, khususnya di Indonesia, angka kemiskinan justru memburuk. Termasuk di beberapa daerah yang memiliki potensi Sumber daya alam (SDA) yang cukup tinggi. Salah satu faktor penting yang menyebabkan kemiskinan tertanggung adalah, fluktuasi dan stagnasi keparahan kemiskinan, tidak ada perubahan strategi distribusi pendapatan secara nasional (Rusastra 2011, 90), beberapa hal yang juga menghambat tujuan MDG's.

Globalisasi dan industrialisasi saat ini, menjadi tantangan baru bagi dunia, di mana kehadirannya mendesak dunia secara global berada di bawah ancaman krisis lingkungan. Suatu kondisi yang terus meremajakan kemiskinan di beberapa negara. Selain ancaman *global warming*, krisis ekologi juga disebabkan oleh masifnya kekuatan industri di beberapa daerah yang kaya akan sumber daya alam. Sehingga polanya dapat dengan mudah ditebak, dimana ada daerah sumber daya alam yang melimpah, dapat dipastikan di situ pasti ada korporasi yang mendudukinya. Indonesia sebagai Negara yang memiliki kekayaan SDA melimpah, mulai dari darat hingga laut, memiliki kesempatan luar biasa untuk menjadi Negara maju. Jika dapat mengoptimalkan kekayaan dan kekuatan yang dimiliki. Namun nahas, masifnya eksploitasi terhadap lingkungan oleh korporasi, baik di sektor perkebunan, pertanian atau pun tambang membuat dampak

kerugian besar, baik kepada masyarakat secara khusus maupun kepada Negara secara umum. Eksploitasi SDA oleh korporasi sejatinya tidak hanya menciptakan kerusakan lingkungan, tetapi kerugian Negara dan sebagian besar rakyat yang hanya merasakan dampak yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, kekuatan dan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki seolah menjadi kutukan (*resource curse*). Tingginya angka kemiskinan, seolah membuktikan tesis itu.

Salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang tinggi adalah, Sumenep. Di pulau garam ini sudah banyak berdiri blok-blok migas. Keberadaan blok migas kebanyakan di wilayah lepas pantai, dan seringkali terjadi gesekan antara kepentingan nelayan dan tekanan investasi migas. Pulau Sumenep kita tahu memiliki puluhan pulau-pulau kecil yang menjadi kekayaan tersendiri. Namun demikian, seperti yang dikatakan oleh Pelling dan Uitto dalam Agus Romadhon bahwa, pulau-pulau kecil merupakan kawasan yang memiliki resiko terkena dampak perubahan lingkungan tinggi, misalnya, ancaman dan degradasi ekosistem terumbu karang sebagai inti pada sistem sosial-ekologi, dan ancaman terhadap keberadaan ekosistem terumbu karang salah satunya datang dari perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global (Romadhon 2014, 159). Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap kualitas terumbu karang, seperti yang dikatakan oleh Chen bahwa, pemanasan global akan membuat terumbu karang mengalami pemutihan (*coral bleaching*) dan menyebabkan populasi ikan menjadi menurun yang mempengaruhi aktivitas para nelayan. Selain itu, perubahan iklim juga meningkatkan intensitas dan frekuensi badai di lautan dan pesisir (Romadhon 2014). Kondisi ini menyebabkan terganggunya aktivitas para nelayan, masyarakat yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya laut dan pesisir (Romadhon 2014).

Krisis ekologi dan pemanasan global yang membuat iklim tidak menentu, tidak hanya mempengaruhi aktivitas para nelayan, tetapi juga para petani (Asnawi 2015, 296). Selain sebagai Negara maritim, Indonesia juga merupakan Negara pertanian yang memegang peranan penting perekonomian nasional. Hal ini bisa dibuktikan dengan

banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian dan produk nasional yang berasal dari pertanian (Hidayati and Suryanto 2015, 43). Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim karena, berpengaruh terhadap pola tanam, waktu tanam, produksi, dan kualitas hasil (Hidayati and Suryanto 2015).

Oleh sebab itu, nelayan dan petani adalah wajah kemiskinan yang sebenarnya. Namun pertanyaannya, kenapa kemudian para nelayan dan petani masih tetap menjalani aktivitas mereka, jika memang benar bahwa perubahan iklim tidak menguntungkan terhadap tingkat kesejahteraan mereka? Pada titik inilah kemudian kita akan disuguhkan pada sebuah kompleksitas realitas masyarakat, di mana adaptasi dan strategi pemenuhan kebutuhan rumah tangga para nelayan dan petani di pedalaman Sumenep akan menjadi kekhasan dalam penelitian ini. Kondisi alam yang tidak menentu, dan krisis lingkungan yang semakin menekan aktivitas para nelayan dan petani di pedalaman menuntut mereka untuk beradaptasi dengan kondisi itu, serta dapat mengembangkan strategi pemenuhan kebutuhan mereka dengan lebih tangguh.

## **Metode dan Kerangka Teori Dalam Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga**

### ***Strategi Pemenuhan Kebutuhan (Nafkah) Rumah Tangga (Livelihood Strategi)***

Penelitian ini menggunakan perspektif *livelihood strategi* sebagai upaya untuk memotret kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya strategi pemenuhan kebutuhan setiap rumah tangga di Sumenep. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis literature, oleh karena itu *Livelihood* atau juga sering juga disebut sebagai ‘pola nafkah’ sebagai satu strategi individu-individu di dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan banyak dielaborasi di dalam kajian ini. Seperti yang dikatakan oleh Darmawan dalam Sakaria J. Anwar bahwa, *livelihood strategi* meliputi pendapatan, asset, serta pemanfaatan lembaga-lembaga sosial baik formal mau pun informal

seperti kekerabatan keluarga, komunitas yang melibatkan seluruh element masyarakat desa (Anwar 2016, 12).

Aset sebagai kekayaan seseorang berdasarkan telaah yang dilakukan oleh Conwey dan Chambers dalam analisis strategi pemenuhan kebutuhan memiliki beberapa komponen penting yang tak terpisahkan. Komponen-komponen itu meliputi; *modal alam, modal fisik, modal manusia, modal uang*, dan yang terakhir adalah *modal sosial*. Lima komponen ini sekaligus dapat menunjukkan strategi pemenuhan nafkah (Anwar 2016, 4).

Komponen-komponen ini berhak digunakan oleh individu-individu di dalam sebuah relasi sosial masyarakat. Setiap individu dapat memainkan segala bentuk strategi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Terutama disaat memasuki fase-fase krisis tertentu berdasarkan dengan kemungkinan yang paling diklaim rasional oleh setiap masyarakat. Oleh sebab itulah kemudian, teori pilihan rasional juga akan sangat berpengaruh di dalam *livelihood strategi* ini. Puncaknya adalah, masyarakat akan cenderung menggunakan modal sosialnya daripada menggunakan modal non-sosial ketika berada pada satu titik krisis tertentu. Karena pada dasarnya, *livelihood strategi* ini juga memotret bahwa, modal sosial yang digunakan oleh masyarakat tidak selamanya (selalu) berorientasi pada nilai ekonomi saja, tetapi juga sering digunakan sebagai memperkuat modal sosial itu sendiri.

Jadi pada dasarnya, strategi nafkah (*livelihood*) merupakan pilihan-pilihan rasional atas sumber-sumber nafkah yang ada di sekitarnya. Jadi, ketika pilihan semakin beragam, maka strategi nafkah juga memungkinkan untuk dilakukan dengan jumlah yang lebih beragam pula. Carner mengasumsikan bahwa, terdapat beberapa strategi yang dapat diupayakan oleh setiap individu di dalam satu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya: *pertama*, bekerja meskipun dengan upah yang sangat minim. *Kedua*, memanfaatkan ikatan kekeluargaan. *Ketiga*, melakukan migrasi dari desa-ke kota sebagai pilihan paling akhir dari upaya pemenuhan kebutuhan (Widodo 2008, 2).

### ***Teori Modal Sosial***

Modal sosial merupakan suatu teori yang sudah tidak asing di dalam wilayah ilmu sosial. Oleh sebab itu, di dalam perjalanannya sampai sekarang, teori modal sosial sudah mengalami perkembangan. Teori modal sosial, menjadi satu teori yang sangat populer di dalam wilayah input kebijakan atau strategi pembangunan, karena modal sosial menjadi satu sumberdaya spesifik yang dijadikan sebagai landasan untuk memobilisasi asset-aset produktif oleh individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, teori modal sosial juga dianggap penting di dalam upaya meng-*capture* permasalahan ini. Melalui pendekatan teori ini, pola strategi pemenuhan nafkah masyarakat pesisir akan terpetakan dengan jelas.

Teori modal sosial sudah banyak disentuh dan digunakan sebagai pisau analisis oleh para ilmuwan, jika dirunut pada awal perkembangannya, teori modal sosial atau *social capital* ini pertama diperkenalkan oleh James Colmen (1930) hingga Piere Bourdieu (1968), analisis yang dibangun oleh beberapa tokoh terkait soal modal sosial ini sama-sama berlandaskan pada ‘sumber daya’ yang potensial, yang dimiliki oleh setiap individu atau pun kelompok yang berasal dari sebuah konjungsi institusi atau lembaga yang bersifat *sustainable*(Anwar 2016, 6) . Oleh sebab itulah kemudian, modal sosial menjadi unsur paling vital di dalam strategi pengembangan ekonomi seperti yang diungkapkan oleh Robert Putnam (Lawang 2005, 37). Oleh sebab itulah kemudian, kesejahteraan masyarakat menjadi satu indicator dasar sekaligus menjadi representasi politik. Kemakmuran atau kesejahteraan menjadi satu kata penjelas bahwa, modal sosial memungkinkan seorang individu atau kelompok berpartisipasi di dalam keefektifan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Hal ini juga sekaligus memudahkan pemerintah di dalam melakukan monitoring dan mengontrol kebijakan pembangunan. Modal sosial oleh sebab itu, dibangun di atas kepercayaan (*trust*) di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Oleh sebab itulah, tipe modal sosial dibagi menjadi tiga bagian seperti yang dikatakan oleh Waclook, yaitu: (1) *bounding social capital*, (2) *Bridging social capital*, (3) *linking social capital*(Lawang 2005, 9).

Tiga tipe ini dapat bekerja tergantung kondisi yang ada di dalam masyarakat.

***Bounding social capital***

Untuk tipe modal sosial yang pertama ini adalah, berupa nilai, kultur, tradisi atau adat istiadat yang berlaku di setiap lingkungan masyarakat. Tipe modal sosial ini adalah ditandai dengan adanya ikatan yang kuat di dalam system yang dibangun oleh masyarakat.

***Bridging social capital***

Sedangkan tipe yang kedua ini adalah lebih cenderung pada mekanisme atau sebuah institusi yang ada di dalam masyarakat. *Bridging social capital* ini biasa muncul karena sifat atau karakteristik sebuah kelompok, misalnya karena kelemahan masyarakat membangun sebuah kekuatan di luar dirinya.

***Linking social capital***

Merupakan sebuah jaringan atau hubungan yang ditunjukkan dengan adanya hubungan antar level yang ada di dalam masyarakat. Jadi keanggotaan bersama, dan seperangkat nilai bersama, dan sekaligus dengan sendirinya melahirkan tanggung jawab bersama, kepercayaan, dan resiprositas, menjadi ikatan yang menguatkan hubungan masyarakat sekaligus menjadi inti dari teori modal sosial.

**Hasil Kajian Terhadap Strategi Baru Masyarakat Pesisir dan Pedalaman Dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga**

Kemiskinan sampai saat ini merupakan soal utama yang masih belum terpecahkan di kita, Indonesia. Persoalan ini menjadi pembahasan penting sekaligus menarik perhatian semua kalangan dari waktu ke waktu, namun penyelesaiannya hingga sampai saat ini masih belum sampai pada inti permasalahannya. Pada dasarnya, kemiskinan merupakan beban dunia secara global, oleh sebab itulah kemudian proyeksi pengentasan kemiskinan disadari sebagai langkah wajib oleh setiap Negara, tidak terkecuali negara-negara maju bersepakat untuk

melawan kemiskinan. Upaya besar yang dianggap mampu untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals*(SDG's) yang dilaksanakan oleh PBB pada 2012 silam di Rio de Janeiro. Dalam pertemuan itu disepakati tujuan utama yang bersifat universal dari SDG's yakni, menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi (Ishatono and Raharjo 2016, 163). Pondasi utama SDG's untuk menjaga keseimbangan tiga dimensi ini adalah: manusia, planet, kesejahteraan, kemitraan, dan perdamaian. Langkah-langkah ini diyakini mampu mencapai tujuan utama SDG's di tahun 2030, yakni pengentasan kemiskinan dan terciptanya kesetaraan (Ishatono and Raharjo 2016).

Akan tetapi sejauh ini, upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan berkelanjutan ala *SDG's* tidak mampu mencegah memburuknya kemiskinan di daerah-daerah terpencil dan ekstrim macam pesisir dan pedalaman. Dua daerah ini, masih bergelut dengan soal sosial-ekonomi yang terkait dengan karakteristik sumberdaya serta teknologi yang digunakan. Pada dua tempat paling ekstrim ini seperti yang dikatakan oleh Smith dan Anderson bahwa, masyarakat pesisir tidak kunjung keluar dari soal yang membelitnya yakni, kemiskinan. Kekakuan asset yang mereka miliki, menjadi sesuatu yang tak bisa dilikuidasi atau diubah bentuk fungsinya untuk digunakan pada kepentingan lain. Akibatnya adalah ketika produktifitas asset itu rendah, nelayan tidak bisa mengalih fungsikan, sehingga para nelayan tetap melakukan aktivitas mereka meskipun operasi berlayar sudah tidak efisien dan tidak lagi menguntungkan. Selain itu, kenapa kemudian masyarakat pesisir cenderung akan tetap memilih untuk bertahan di tengah kemiskinan, dengan hanya mengandalkan laut sebagai modal utama untuk memenuhi kebutuhan mereka, tidak lain karena masyarakat pesisir memiliki kesenangan tersendiri di dalam berlayar (Widodo 2011).

Alih-alih untuk mengurangi tingkat kemiskinan di daerah-daerah ekstrim dan terpencil, pembangunan dan industrialisasi justru semakin menyudutkan masyarakat pada situasi yang semakin parah.

Hal ini ditunjukkan dengan semakin gencarnya eksplorasi sumberdaya alam melalui pembangunan blok-blok migas. Tidak berlebihan jika kemudian beberapa kalangan menyebutkan bahwa, penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan adalah dampak dari strategi pembangunan yang tidak ramah lingkungan dan tidak pro-rakyat (Lako 2015, 2). Di Sumenep misalnya, terdapat 17 blok migas, dan walaupun kerap kali mendapat kritik karena persoalan ekologi yang disebabkan oleh industri migas di kawasan Sumenep dan pesisir, korporasi-korporasi itu masih terus melakukan akumulasi kapital, dan Sumenep masih menjadi lahan empuk pemodal untuk terus mengeruk kekayaan alam di pulau garam (Hartati 2012).

Massifnya pembangunan serta industrialisasi ternyata tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, terutama kepada petani dan nelayan. Akhirnya perubahan iklim yang tidak menentu, krisis ekologi dan global warming adalah dampak paling parah yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan dan industrialisasi itu sendiri. Mengakibatkan rusaknya terumbu karang yang semakin menurunkan populasi ikan, semakin tingginya bencana di laut atau pun di darat, sangat mengganggu terhadap aktivitas para nelayan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa, strategi dan kebijakan pembangunan nasional, lebih mengutamakan kepentingan ekonomi negara dan para pemilik modal, daripada kepentingan lingkungan dan masyarakat (Lako 2015).

Sedangkan di daerah agraris Sumenep, sumberdaya yang sebelumnya relative terkontrol, mulai dari pengelolaan lahan untuk diproduksi menjadi suatu komoditas relative bisa diprediksi sebelumnya kini berubah arah. Saat ini para petani cenderung tidak bisa mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang mereka miliki, karena perubahan iklim (*climate change*) cenderung tidak bisa diprediksi saat ini. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh kepada pola cocok tanam, waktu tanam, dan hasil tanam (Asnawi 2015, 295).

## **Strategi Pemenuhan Nafkah (*livelihood*) Masyarakat Pesisir Sumenep**

Masyarakat pesisir sangat lekat dengan laut. Laut menjadi segalanya bagi masyarakat pesisir di tengah kebutuhan hidup yang cenderung semakin tinggi. Ketergantungan masyarakat pesisir terhadap laut masih sangat tinggi. Meskipun kondisi laut sudah tidak bisa dimaksimalkan, akibat perubahan iklim yang cenderung tidak dapat diprediksi dengan tepat, serta asset untuk menopang aktivitas melaut yang tidak memadai, membuat kondisi masyarakat pesisir berada di titik rentan. Kemampuan mobilitas sosial masyarakat menjadi rendah. Hal ini mengakibatkan investasi masyarakat pesisir di luar sektor berlayar, atau penangkapan ikan menjadi relative tidak bisa dipenuhi (Anwar 2016, 20). Terutama ketika memasuki musim-musim *nimbarak* (musim hujan yang disertai angin kencang membuat kondisi gelombang di laut menjadi tinggi dan cenderung membahayakan, dan ikan menjadi sulit ditangkap). Pada musim '*nimbarak*' para nelayan di daerah pesisir Sumenep akan sangat sulit untuk memaksimalkan laut, sebagai sumber pemenuhan kebutuhan mereka. Pada musim inilah kemudian, adaptasi dan pengembangan strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir diuji.

Aktivitas melaut yang tidak maksimal pada satu sisi, dan kebutuhan hidup yang menuntut pada sisi yang lainnya, mendorong para nelayan di pesisir Sumenep untuk mengembangkan strategi pemenuhan kebutuhan mereka. Masyarakat di pesisir ketika menghadapi musim ekstrim, akan cenderung untuk melakukan pekerjaan apapun meskipun dengan upah yang sangat minim. Kondisi ini tentu semakin memperburuk masyarakat miskin di daerah pesisir, karena pendapatan yang minim dan sangat tidak menentu. Membuat masyarakat pesisir sangat sulit untuk mengakses modal.

Bekerja kepada kerabat dekat atau tetangga menjadi pilihan rasional kepada masyarakat pesisir Sumenep untuk memenuhi nafkah keluarga mereka disaat sedang terdesak kebutuhan ekonomi. Bekerja kepada saudara, memiliki standar nilai ekonomi yang relative lebih rendah dari hasil menangkap ikan, akan tetapi karena kebutuhan di

dalam keluarga setiap hari terus berjalan maka, modal sosial yang digunakan adalah modal kekerabatan. Dengan menggunakan sistem kekerabatan di dalam upaya untuk mengakses kebutuhan nafkah keluarga kebutuhan sehari-hari keluarga masyarakat pesisir bisa diatasi dengan sistem strategi modal sosial.

Strategi ini tidak selalu menjadi pilihan umum masyarakat pesisir dalam beberapa tahun terakhir ini. Globalisasi dan industrialisasi tidak hanya mempengaruhi terhadap semakin tergerusnya ketahanan alam untuk memberikan kebutuhan manusia karena global warming yang menyebabkan iklim tidak menentu. Krisis ekologi semakin memicu banyaknya bencana alam yang menghambat aktivitas para nelayan, seperti misalnya badai di lautan yang rawan terjadi akhir-akhir ini (hasil wawancara dengan nelayan di daerah pesisir, Dungkek, Sumenep). Tetapi juga mempengaruhi terhadap perilaku masyarakat. Kebutuhan masyarakat saat ini, dalam hal ini adalah kebutuhan masyarakat pesisir dan masyarakat agraris di daerah pedalaman, terlihat semakin tinggi. Dulu, ketika musim memasuki masa ekstrim (*nimbarak*), yang dilakukan oleh para nelayan adalah memperluas strategi pemenuhan kebutuhan mereka melalui modal sosial yang meliputi; jejaring pertetanggaan, perkawanan di daerah, serta kekerabatan. Akan tetapi saat ini, masyarakat pesisir mengembangkan strategi pemenuhan kebutuhan mereka dengan cara melakukan migrasi ke kota-kota besar, langkah terakhir yang dulu mereka pilih saat sudah berada pada situasi yang paling buruk. Saat ini, merantau sudah hampir menjadi kegemaran tersendiri bagi masyarakat-masyarakat pesisir. Seperti beberapa nelayan di daerah Dungkek, Gili Genting, dan Sarongkih yang sudah banyak memiliki usaha kecil di beberapa kota, termasuk di Jakarta, Bali dan Kalimantan (hasil observasi lapangan). Kenyataan ini justru berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Panayotou bahwa, nelayan mau tetap tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan itu (*preference for a particular way of life*)(Darmawan 2001), artinya nelayan memiliki kepuasan hidup tersendiri dari proses penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan

bukan berlaku hanya untuk orientasi peningkatan pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka *an sich*. Maka apapun yang terjadi, karena laut adalah '*way of life*' mereka, kondisi seburuk dan se ekstrim apapun tidak dianggap sebagai sesuatu yang mengancam atau masalah oleh para nelayan dulu (Darmawan 2001). Kondisi ini tidak lagi menjadi suatu penanda bagi pola dan dinamika pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir, tuntutan kebutuhan yang semakin beragam, mendorong masyarakat pesisir untuk mengembangkan strategi pemenuhan kebutuhan mereka, dan tidak menempatkan laut sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka saat ini.

### **Strategi Pengembangan Nafkah (*Livelihood*) Keluarga Petani di Pedalaman**

Secara sosiologis, masyarakat agraris memiliki perbedaan dengan masyarakat pesisir atau nelayan. Hal utama yang membedakan kondisi sosiologis masyarakat pesisir dan masyarakat agraris adalah, sumberdaya yang dihadapi dan dikelola oleh mereka. Masyarakat agraris direpresentasikan dengan masyarakat petani, sumberdaya yang terkontrol, pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas, dalam hal ini adalah tanaman, dengan hasil yang relative bisa diprediksi (Satria 2015, 7). Kondisi ini memperlihatkan bahwa, situasi yang dihadapi oleh masyarakat petani agraris di pedalaman tidak terlalu ekstrim sebagaimana situasi yang dihadapi oleh masyarakat pesisir ketika memasuki musim ekstrim yang tidak menguntungkan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki. Lahan produksi yang tidak berubah pada satu sisi sangat menguntungkan bagi para petani agraris di pedalaman. Akan tetapi, kondisi ini sudah menjadi potret usang bagi masyarakat petani agraris. Global warming yang mendorong iklim yang cenderung berubah-ubah menempatkan masyarakat petani agraris dalam satu 'kotak' yang sama dengan para nelayan di daerah pesisir. Lahan pertanian saat ini, tidak bisa dijadikan sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga oleh para petani. Meski demikian, sebagaimana para nelayan di daerah pesisir,

masyarakat petani di daerah agraris atau bahkan di pedalaman, tidak serta-merta meninggalkan lahan pertanian mereka.

Perubahan iklim adalah satu soal besar bagi para petani di pedalaman, kondisi ini menyebabkan penurunan intensitas hujan (Hidayati and Suryanto 2015, 43). Intensitas hujan sampai saat ini masih menjadi kunci utama keberhasilan para petani di pedalaman. Intensitas air hujan sangat menentukan terhadap maksimal atau tidaknya hasil panen para petani. Kenyataannya saat ini, perubahan iklim yang disebabkan oleh *global warming* dan krisis ekologi menyebabkan berkurangnya intensitas hujan, bahkan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di beberapa Negara Asia seperti India misalnya (Hidayati and Suryanto 2015). Penurunan hasil panen para petani karena tidak maksimalnya produksi pertanian mereka akan mempengaruhi terhadap pendapatan para petani tentunya. Bahkan implikasi yang paling jauh adalah, semakin terkikisnya keinginan masyarakat untuk meneruskan profesi mereka sebagai petani.

Untuk mengatasi kondisi iklim yang semakin ekstrim ini, dimana lahan pertanian tidak bisa dikelola dengan maksimal karena perubahan iklim yang cenderung tidak bisa diprediksi, para petani memilih untuk mengembangkan strategi pemenuhan kebutuhan rumah tangganya dengan cara melakukan migrasi ke kota-kota seperti Jakarta, Bali, Kalimantan, Samarinda dan lainnya, dan yang paling marak saat ini adalah, para petani memilih untuk melakukan untuk transmigrasi ke luar kota seperti Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Singapore dan lain sebagainya. Kenyataan ini tidak bisa dipungkiri sebagai implikasi dari rendahnya curah hujan di Sumenep menyebabkan tidak subur dan hasil panen tidak dapat membantu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat petani (Rahayuningsih 2018, 20).

Selain itu, budaya globalisasi-industrialisasi tidak bisa dipungkiri semakin mendorong masyarakat untuk semakin konsumtif, tidak terkecuali masyarakat di element paling bawah: nelayan dan petani. Produksi barang menjadi semakin massif, teknologi-teknologi baru juga diciptakan untuk menopang hal ihwal kepentingan manusia, dan

lagi-lagi, dampak dari kemajuan ini adalah “ancaman” global warming, krisis ekologi, akibat dari menipisnya kemampuan alam untuk memenuhi kepentingan umat manusia (Giddens 2002, 67–73). Pada titik inilah kemudian para nelayan dan petani berada di dua titik ambiguitas yang cenderung tidak dapat dihindari.

Oleh sebab itulah kemudian para nelayan dan petani di pedalaman dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi ini, serta harus mampu mengembangkan strategi pemenuhan kebutuhan mereka. Sebab bagaimanapun, masyarakat pesisir dan petani di pedalaman tidak mungkin serta-merta meninggalkan modal paling berharga yang menjadi urat nadir mereka. Oleh sebab itu strategi nafkah rumah tangga (*livelihood strategy*) menjadi suatu keniscayaan. Strategi nafkah rumah tangga masyarakat pesisir dan petani di pedalaman sama-sama memiliki kekuatan pada sisi modal sosial. Akan tetapi, pola kondisi ekstrim di dua tempat ini tidak berlangsung secara bersamaan, dan saat ini cenderung semakin tidak bisa diantisipasi.

Masyarakat pesisir yang didominasi oleh para nelayan memiliki strategi pengembangan mata pencaharian yang sangat berbeda dengan masyarakat di pedalaman yang banyak menggantungkan keberlangsungan hidup mereka pada sektor pertanian. Jadi, kondisi alam akan sangat menentukan terhadap strategi pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Dua daerah ini masing-masing mengalami masa-masa krisis di dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Pada musim *nemberek* (musim kemarau dengan angin yang sangat kencang) antara bulan Oktober-Maret mempengaruhi kondisi laut yang menjadi sangat ekstrim, dan implisit akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir karena tidak bisa memaksimalkan kerja mereka sebagai nelayan. Berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di pedalaman Sumenep, pada saat yang sama, mereka bisa mengoptimalkan lahan mereka untuk ditanami segala macam kebutuhan hidup, seperti padi, singkong, jagung dan lain sebagainya. Akan tetapi, masa-masa krisis juga akan menimpa masyarakat di daerah pedalaman antara bulan April-September, pada fase ini masyarakat pedalaman harus bisa mengembangkan strategi

pemenuhan kebutuhan mereka karena pertanian mereka menjadi tidak optimal karena kondisi alam yang tidak mendukung. Sementara pada saat yang sama, masyarakat pesisir bisa mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan mereka melalui laut.

Oleh sebab itulah kemudian, modal sosial yang dikembangkan oleh para nelayan dan petani adalah, mengembangkan jaringan eksternal mereka, seraya mengembangkan usaha. (Satriawan and Oktavianti 2012, 107–8). Baik melalui jaringan pertemanan ataupun jaringan kekerabatan yang dapat mengakses pekerjaan di luar daerah mereka, yakni memilih untuk merantau, baik menjadi buruh di daerah perkotaan atau Negara lain, atau mengadu nasib dengan membangun usaha kecil. Dalam situasi kemudian kebijakan pemerintah menjadi pertarungan penting untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di dua tempat yang berbeda ini; berbeda secara budaya, dan berbeda secara aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup.

### **Krisis Ekologi dan Budaya Konsumtif Nelayan-Petani**

Kondisi Sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat pesisir dan pedalaman di Sumenep harus disikapi dengan komprehensif. Situasi ini bukan semata lemahnya kebijakan di dalam sektor pengentasan kemiskinan. Keadaan ini tidak bisa dilepaskan dari implikasi industrialisasi dan globalisasi yang mendorong masyarakat Sumenep menjadi konsumtif. Anthony Giddens menyebut bahwa dunia kini dicirikan oleh *manufactured uncertainty* (Giddens 2002), kenyataan dimana pada masa sekarang diliputi oleh “ketidakpastian”. Situasi yang ditimbulkan tidak hanya oleh alam, tetapi oleh manusia sendiri karena teknologi dan kepentingan yang semakin tidak terbendung. Pada gilirannya masyarakat yang berada di lapisan bawah, harusanggung resiko yang sangat tinggi, atau dalam istilah Giddens adalah, *high consequence risk* (Giddens 2002). Iklim tidak menentu, konservasi ikan semakin rendah, lahan pertanian tidak bisa dikelola dengan maksimal. Akhirnya yang paling banyak dikorbankan dan merasakan penderitaan adalah, petani dan nelayan, karena kemiskinan semakin tertanggung.

Pada titik inilah kita dapat melihat, secara aksiologis, ekologi manusia diperkaya oleh munculnya fenomena *risk society* dalam sistem etika dan estetika peradaban modern. Sistem masyarakat berisiko terbentuk sebagai akibat penggunaan teknologi dan gaya hidup modern yang serba “*short cut*”, eksploitatif terhadap sumber daya alam, serta serba instan tanpa mengindahkan dampaknya (Dharmawan 2007, 4). Kenyataan ini sekaligus membuktikan bahwa, nilai-nilai *wisdom* yang menjadi keunikan dan kekhasan tersendiri bagi setiap masyarakat daerah, tidak ditransmisikan dengan maksimal oleh masyarakat lokal, karena gempuran budaya konsumtif serba *short cut*, menggerus nilai-nilai budaya adiluhung suatu daerah seperti masyarakat pesisir dan pedalaman di Sumenep.

Pemerintah dalam konteks ini, harus dapat bersinergi dengan masyarakat, melihat kompleksitas masalah sosial di atas. Persoalan Sumber Daya Alam (SDA) bukan hanya semata-mata persoalan teknis, tetapi juga merupakan masalah sosial-politik yang berkaitan dengan akses pemanfaatan dan Kontrol atas Sumber Daya Alam (Satria 2009, 2). Namun persoalannya sekarang adalah, berbagai persoalan sumber daya alam muncul, baik dari laut, udara, dan darat, cenderung dipahami dan disikapi sebagai masalah teknis. Implikasinya adalah, solusi yang diberikanpun bersifat teknis (Satria 2009). Misalnya, ketika sungai mengalami pencemaran akibat proses produksi dan industri pertambangan, maka yang dicarai adalah solusi teknis, dengan berusaha menemukan teknologi yang lebih ramah lingkungan (Satria 2009). Persoalan teknis bukan menjadi sesuatu yang tidak penting, namun apakah solusi teknis ini selalu efektif untuk mengurangi masalah sumber daya alam dan tidak akan memicu persoalan baru?

Dari persoalan ini kita dapat menyimpulkan bahwa, peran pemerintah Sumenep selama ini tidak menunjukkan semangat yang kuat untuk memotong rantai kemiskinan, dan menguatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan bahwa, tidak ada edukasi yang intens dari pemerintah untuk memberikan pengetahuan terkait dengan krisis ekologi, tidak ada upaya untuk mengembangkan kemampuan masyarakat nelayan dan petani, di

tengah kondisi alam yang tidak menentu, sehingga strategi untuk merespon perubahan itu tidak dilakukan dengan maksimal oleh masyarakat (Satriawan and Oktavianti 2012, 100). Penting kemudian untuk mundur satu langkah, untuk kembali menyoal sinergisitas pemerintah dengan masyarakat di kabupaten Sumenep, dalam upaya menanggulangi ancaman global warming, krisis ekologi yang semakin menekan terhadap kondisi masyarakat pesisir dan petani di pedalaman.

### **Peran Pemerintah di Dalam Menjawab Isu-Isu Lingkungan dan Kemiskinan**

Langkah konkrit sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah dengan Strategi Kebijakan. Karena pada kenyataannya, kerja dan fungsi beberapa strategi kebijakan itu masih belum berbanding lurus dengan fakta di lapangan, dimana kemiskinan masih belum dapat diminimalisir dengan efektif. Sebagai daerah yang memiliki kekayaan SDA yang sangat melimpah, dan memiliki banyak destinasi wisata, sudah waktunya Sumenep keluar dari cengkeraman kemiskinan. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain, Sumenep merupakan daerah paling kompleks dengan ketersediaan Sumber Daya Alam yang sangat tinggi, terutama dari kekayaan migasnya. Nyatanya hingga saat ini, merajut benang kesejahteraan ternyata bukan suatu hal yang mudah, khususnya bagi elit pemerintah Sumenep, jika tidak ingin disebutkan gagal. Sejauh ini, tidak ada kebijakan atau program yang dikeluarkan pemerintah dan secara spesifik diproyeksikan untuk melawan kemiskinan.

Alih-alih mendorong masyarakat sejahtera secara ekonomi, persentase kemiskinan di kabupaten Sumenep dalam kurun waktu tiga tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2017 angka kemiskinan masih sangat tinggi. Mengalami penurunan tidak sampai 1 %. Pada tahun 2015 persentase kemiskinan di kabupaten Sumenep berada di 20.20%, sementara pada tahun 2016 angka kemiskinan berada di angka 20.09%, sedangkan pada tahun 2017 persentase kemiskinan di kabupaten Sumenep masih juga tidak mengalami penurunan yang signifikan yakni berada di angka 19.62% (Badan Pusat Statistik

Sumenep, 2018). Daerah-daerah pesisir yang menjadi penduduk paling dekat dengan SDA, yang menjadi daerah penyumbang pendapatan daerah terbesar, justru menjadi kelompok dengan kerentanan yang sangat tinggi. Fakta ini menjelaskan bahwa, lingkungan hidup dan kondisi sosial mengalami degradasi, justru setelah pemerintah meletakkan parameter pertumbuhan ekonomi dalam paradigme *developmentalisme* (Hartati 2012).

Dalam masalah ini, pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi baru untuk mengentaskan kemiskinan. Akan diarahkan ke mana otoritas dan segala atribut yang sudah dimilikinya, terutama tanggung jawab terhadap APBD Sumenep yang terbilang tinggi dengan jumlah jiwa mencapai 1.081.204 jiwa. Pada tahun 2017 misalnya, kabupaten Sumenep memiliki APBD 2.090.630.997.056.00, dengan pendapatan asli daerah mencapai 191.950.484.569.00, sementara pada tahun 2018 APBD kabupaten Sumenep mencapai 2.180.556.865.477.00 dengan pendapatan asli daerah mencapai 221.296.639.290.00 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, 2018). Anggaran ini tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan yang tidak signifikan dalam tiga tahun terakhir. Terutama pada tahun 2016 dimana persentase penurunan angka kemiskinannya tidak mendekati 1%. Maka dari sinilah kemudian, harus ada telaah ulang terhadap strategi kebijakan dan program pemerintah kabupaten Sumenep, khususnya program pengentasan kemiskinan yang tidak jelas juntrung hingga sampai saat ini.

Beberapa dekade terakhir, pemerintah kabupaten Sumenep hanya berfokus pada pembangunan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan prasarana saja, terutama di daerah-daerah pedalaman dan di daerah pesisir. Namun strategi kebijakan tersebut tidak mampu merepresentasikan kehadiran pemerintah, untuk menjawab kebutuhan utama masyarakat. Strategi kebijakan yang diupayakan oleh pemerintah Sumenep masih jauh panggang dari api. Perlu ada kesadaran baru pemerintah untuk memoles inovasi baru dalam suatu kebijakan yang lebih pro-masyarakat miskin (*poverty*). Salah satu aspek penting yang harus disadari pemerintah adalah, kebutuhan untuk

mendapatkan peluang penghasilan lebih tinggi, di mana negara berkembang seperti Indonesia dapat mengandalkan sektor SDA yang mumpuni (Hartati 2012).

Memproduksi kebijakan yang ideal untuk mengentaskan kemiskinan oleh karena itu, penting untuk memotret kondisi masyarakat di dua tempat berbeda ini (nelayan dan petani), sebagai daerah yang memiliki indikator-indikator ideal untuk memotret kesejahteraan masyarakat Sumenep secara umum. Langkah ini dapat mendorong pemerintah untuk menarik kesimpulan yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan di kabupaten Sumenep. Karena dua daerah ini (pesisir dan pedalaman) memiliki kondisi yang sangat jauh berbeda satu dengan yang lainnya, di dalam strategi pemenuhan kebutuhan hidup mereka (*livelihood*).

Masyarakat pesisir yang didominasi oleh para nelayan memiliki strategi pengembangan mata pencaharian yang sangat berbeda, dibandingkan petani yang mengandalkan lahan. Persamaannya adalah, kondisi alam akan sangat menentukan terhadap strategi pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Dua daerah ini masing-masing mengalami masa-masa krisis di dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Pada musim *nimbarak*, antara bulan Oktober-Maret mempengaruhi kondisi laut menjadi sangat ekstrim, dan implisit akan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir, karena tidak bisa memaksimalkan kerja mereka sebagai nelayan. Tetapi pada saat yang sama, petani di pedalaman dapat mengoptimalkan lahan mereka untuk ditanami segala macam kebutuhan hidup, seperti padi, singkong, jagung dan lain sebagainya (hasil observasi di lapangan).

Akan tetapi masa-masa krisis juga akan menimpa masyarakat di daerah pedalaman antara bulan April-September. Fase ini masyarakat pedalaman harus bisa mengembangkan strategi pemenuhan kebutuhan mereka, lahan pertanian mereka menjadi tidak optimal karena kondisi alam yang tidak mendukung terhadap cocok tanam. Sementara pada saat yang sama, masyarakat pesisir bisa mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan mereka melalui laut.

Pemerintah Sumenep oleh karena itu, penting untuk memotret strategi pemenuhan kebutuhan rumah tangga masyarakat di dua tempat paling ekstrim di Sumenep. Sebagai upaya untuk mengadaptasikan kondisi sosial masyarakat, menjadi suatu kebijakan yang komprehensif dapat menjawab tantangan yang ada di lingkungan sosial. Dengan memotret masyarakat di dua tempat yang memiliki ketidaksamaan di dalam pemenuhan kebutuhannya ini, di mana modal sosial yang mereka kembangkan juga tidak berbeda, pemerintahan dapat mencacah perbedaan strategi *survival* masyarakat, sebagai landasan *in put* kebijakan yang dibutuhkan masyarakat secara holistik. Mengombinasikan antara kekayaan ekologis dengan perkembangan ekonomi masyarakat, adalah hal penting yang mesti segera disadari oleh pemerintah. Langkah ini akan mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan ‘memukul’ kemiskinan hingga ke akarnya. Suatu upaya yang dapat menguatkan kembali budaya gotong royong masyarakat Sumenep, sebagai budaya adi luhung yang sudah terbukti menjadi landasan hidup bersama menuju kesejahteraan sosial (Satriawan and Oktavianti 2012, 105).

### **Kesimpulan**

Kemiskinan yang dialami oleh nelayan dan petani disebabkan oleh faktor yang sama, yaitu perubahan iklim yang tidak menentu. Hal ini karena kedua jenis profesi ini sangat bergantung pada alam, sehingga pendapatan para petani dan nelayan tidak menentu. Mereka akan mendapatkan hasil panen yang sangat baik apabila alam berpihak kepada mereka. Namun, baik petani maupun nelayan tetap mengerjakan pekerjaan mereka (bertani atau nelayan) pada musim kemarau maupun musim penghujan. Walaupun ketika memasuki musim ekstrim, tidak menguntungkan bagi mereka. Hal ini karena apa yang mereka lakukan telah mendarah daging sejak dahulu, meskipun ada sebagian yang lain lebih mengembangkan strategi pemenuhan kebutuhan yang lain, seperti merantau dan membuka usaha.

Mengembangkan suatu strategi tertentu dalam memenuhi kebutuhan adalah kenyataan yang mutual. Salah satunya adalah strategi pemenuhan nafkah (*livelihood strategi*) yang pada gilirannya juga dipengaruhi oleh pilihan rasional, yaitu memanfaatkan modal sosial yang mereka miliki. Karena modal sosial tidak selamanya berorientasi dengan masalah ekonomi, melainkan juga memperkuat modal sosial yang mereka miliki. Hal ini karena modal sosial juga sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Seperti kekerabatan, organisasi formal maupun non formal dan lain sebagainya.

Sinergi pemerintah dan masyarakat melalui sistem pengembangan masyarakat dengan mengupayakan komunitas yang menunjang terhadap peningkatan sosial-ekonomi masyarakat di daerah pesisir dan pedalaman, akan memberikan dampak yang sangat signifikan. Upaya pengembangan masyarakat dengan mendorong tindakan kolektif masyarakat, tidak hanya akan membuat masyarakat mendapat edukasi pengembangan strategi pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi juga sekaligus akan mendorong terciptanya kebersamaan, gotong royong, sebagai budaya adi luhung masyarakat Sumenep yang hampir tergerus, di tengah semakin massifnya produksi budaya populer yang dibawa oleh arus globalisasi-industrialisasi yang semakin dominan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sakaria Anwar. 2016. "Strategi Nafkah (livelihood) Masyarakat Pesisir Berbasis Modal Sosial." *SOCIUS: Jurnal Sosiologi* 13 (1): 1–21.
- Asnawi, Robet. 2015. "PERUBAHAN IKLIM DAN KEDAULATAN PANGAN DI INDONESIA. TINJAUAN PRODUKSI DAN KEMISKINAN" 1 (03): 17.
- Darmawan, Ir. 2001. "Penyusunan Program Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu," 167.
- Dharmawan, Arya Hadi. 2007. "Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif Dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan Dan Ekologi Politik." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1 (1).  
<https://doi.org/10.22500/sodality.v1i1.5939>.
- Giddens, Anthony. 2002. *Jalan Ketiga. Pnj, Ketut Arya Mahardika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hartati, Anna Yulia. 2012. "Global Environmental Regime: Di Tengah Perdebatan Paham Antroposentris Versus Ekosentris." *SPEKTRUM* 12 (2).  
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/view/471>.
- Hidayati, Ida Nurul, and Suryanto Suryanto. 2015. "Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Produksi Pertanian Dan Strategi Adaptasi Pada Lahan Rawan Kekeringan." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 16 (1): 42–52.  
<https://doi.org/10.18196/jesp.2015.0040.42-52>.
- Ishatono, Ishatono, and Santoso Tri Raharjo. 2016. "Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan | Ishatono | Share: Social Work Journal." 2016.  
<http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/13198>.
- Lako, Andreas. 2015. "Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi," 9.

- Lawang, Robert Z. 2005. *Kapital Sosial; Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*. Pertama. Jakarta: FISIP UI Press.
- Rahayuningsih, Eni Sri. 2018. "Analisis Profil Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Asal Madura | Rahayuningsih | Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo." 2018. <https://ecopreneur.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/4437>.
- Romadhon, Agus. 2014. "Analisis Kerentanan Dan Adaptasi Masyarakat Pulau Gili Labak Terhadap Perubahan Iklim Berbasis Ekosistem Terumbu Karang." *Trunojoyo XXII* (lingkungan hidup). <http://ilmukelautan.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/13.ANALISIS-KERENTANAN-DAN-ADAPTASI-MASYARAKAT-PULAU-GILI-LABAK-TERHADAP-PERUBAHAN-IKLIM-BERBASIS-EKOSISTEM-TERUMBU-KARANG.Agus-Romadhon.Disampaikan-Konferensi-dan-Seminar-Nasional-Pusat-Studi-Lingkungan-Hidup-XXII-2014.pdf>.
- Rusastra, I Wayan. 2011. "REORIENTASI PARADIGMA DAN STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM MENGATASI DAMPAK KRISIS EKONOMI GLOBAL1)" 4 (2): 16.
- Satria, Arif. 2009. *Ekologi Politik Nelayan*. Lkis Pelangi Aksara.
- . 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Satriawan, Bondan, and Henny Oktavianti. 2012. "Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 13 (1). <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1732>.
- Widodo, Slamet. 2008. "Migrasi International Tenaga Kerja Pertanian Di Kabupaten Bangkalan." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 1 (1). <https://doi.org/10.21107/pamator.v1i1.3110>.
- . 2011. "Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin Di Daerah Pesisir." *Hubs-Asia* 10 (1).

*Shobebul Umam*

<http://hubsasia.ui.ac.id/old/index.php/hubsasia/article/view/890>.